

Investor Tol Butuh Kepastian Investasi

[JAKARTA] Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk konsisten dalam menjalankan aturan investasi khususnya bidang infrastruktur jalan tol. Ketidakkonsistenan atas regulasi yang dituangkan dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan swasta, bisa menimbulkan ketidakpastian investasi terhadap investor.

"Harus konsisten, karena investasi infrastruktur tersebut berjalan dalam waktu lama dan memiliki risiko tidak kecil," ungkap Senior Economist CSIS (Centre for

Strategic and International Studies), Pande Radja Silalahi, kepada pers di Jakarta, Selasa (27/8).

Mengingat investasi yang cukup besar, selayaknya keduanya harus tetap memegang kontrak yang sudah disepakati bersama. Termasuk dalam penerapan perhitungan pengembalian investasi melalui tarif.

"Pemerintah dan swasta harus saling memegang kesepakatan dalam mengimplementasikan aturan investasi. Dengan begitu, investor merasa terlindungi termasuk dalam investasi jalan tol,"

tukasnya.

Apalagi, menurut Pande, kondisi investasi jalan tol setiap wilayah memberikan kontribusi yang berbeda dari sudut pandang investor. Lalulintas di Kota Jakarta tentu saja berbeda dengan lintas di koridor Sumatera. "Tingkat lalu lintas ini, sangat memengaruhi seberapa cepat tingkat pengembalian investasinya," tuturnya.

Pengamat CSIS ini mengakui, proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak swasta sampai sekarang masih belum menemukan format ideal atau te-

rus mencari pola yang saling menguntungkan. "Bagi pemerintah apakah proyek tersebut berjalan efektif, sebaliknya swasta proyek tersebut apa memberikan keuntungan," kata dia.

Sementara, konsistensi pemerintah sebenarnya bisa diukur dengan sejauh mana mampu menerapkan secara tegas aturan yang telah disepakati bersama. "Investor harus dilindungi dengan regulasi investasi yang kuat, konsisten sekaligus juga fleksible terhadap penyempurnaan aturan," tuturnya.

Masih tingginya ketidak-

pastian investasi, juga diakui oleh Dirut PT Jasa Marga (Persero) Adityawarman. Ia mengatakan, sampai sekarang persoalan yang mendasar adalah kepastian pembebasan tanah.

Diharapkan dengan UU baru ini, pembebasan tanah bisa dipercepat. Sebab, kendala utama adalah penyediaan lahan walau perhitungan *investment rate of return* (IRR) mamadai, karena kendala lahan akhirnya tidak bisa diwujudkan.

"Ini yang menimbulkan ketidakpastian, dan kita berharap UU lahan bisa mendorong penyediaan tanah untuk proyek tol nanti, sedangkan sekarang ini masih menggunakan aturan lama sampai 2014. Ini merupakan bentuk suatu kepastian investasi dari sisi investor," tutur Adityawarman.

Ia juga berharap, nantinya aturan lebih detail dari UU No 2/2012 tentang lahan itu dapat secepatnya dapat dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). "Mudah mudahan aturan lebih detail atau PP-nya, bisa dapat diselesaikan akhir tahun ini, sehingga menambah kepastian investasi," tuturnya. [E-8]